

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kritik Feminis Pasca-Kolonial terhadap *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024)*

Kasus *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024)* Spanyol mengilustrasikan upaya yang didorong oleh negara untuk memposisikan diri sebagai ‘penggerak norma’—mengikuti jejak agenda kebijakan luar negeri feminis Swedia di masa lalu—namun, komitmen performatif ini bisa dibilang masih jauh dari transformasi struktural yang sesungguhnya. Meskipun *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024)* secara formal mempromosikan kesetaraan gender, kebijakan tersebut didasarkan pada konsepsi feminisme universalis yang gagal mengatasi warisan kolonialisme yang telah berlangsung lama serta dampaknya terhadap dinamika kekuasaan berbasis gender kontemporer. Di tengah-tengahnya, terdapat sebuah fenomena yang dikenal sebagai *Machismo* yang mempengaruhi cara para pembuat kebijakan Spanyol menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, *Machismo* lebih dari sekadar ciri budaya; melainkan, manifestasi yang tertanam secara historis dari logika patriarki dan kolonial yang berakar pada identitas nasional Spanyol. Ketahanannya di kalangan generasi muda dan sistem sosial yang mapan menunjukkan normalisasi hierarki gender dalam kehidupan sehari-hari. Normalisasi ini tidak terbatas pada sektor budaya; tapi juga meluas ke ranah kelembagaan dan organisasi, di mana hal tersebut secara bertahap dapat meresap dan mengubah tata kelola domestik serta pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Mengingat mundurnya Swedia dari agenda kebijakan luar negeri feminisnya pasca pergantian ke pemerintahan sayap kanan, telah muncul sebuah celah dalam lanskap feminis global, yang memungkinkan aktor-aktor lain mengambil alih ‘pemimpin’ dalam diskursus negara yang feminis. Dalam konteks ini, Spanyol telah lama memposisikan diri sebagai calon penerus, dengan reformasi hukum dan rencana masa depan terkait

kesetaraan gender, termasuk *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista* (2023-2024). Namun demikian, maraknya kritik terkait operasionalisasi, implementasi, dan kurangnya transparansi seputar kebijakannya tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai motif di balik pengadopsian kebijakan tersebut.

Jika ditelaah lebih dalam, tampaknya agenda kebijakan luar negeri feminis Spanyol selalu didorong oleh pemahaman tunggal tentang feminisme eurosentris arus utama, yang berfokus pada kesetaraan universal, representasi, dan pemberdayaan. Meskipun panduan kebijakan luar negeri feminis Spanyol menetapkan interseksionalitas dan keragaman sebagai salah satu dari lima prinsip prioritasnya, kenyataan di lapangan tampaknya menunjukkan hal yang berbeda. Serangkaian bidang fokus dan langkah-langkah yang ditetapkan dalam panduan tersebut menyoroti upaya yang direncanakan Spanyol dalam melaksanakan tindakan kebijakan luar negerinya yang feminis—secara umum berkisar dari memasukkan isu-isu kesetaraan gender ke dalam posisi politik, memperkuat jaringan organisasi, memberikan dukungan, mempromosikan aliansi dengan aktor-aktor organisasi lain, dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dinas luar negeri—‘rencana’ ini mungkin menunjukkan bahwa upaya Spanyol masih berada dalam kerangka yang lebih luas dan inspiratif yang hanya menekankan komitmen umum, sehingga menyisakan ruang untuk mekanisme konkret yang sebenarnya, struktur akuntabilitas, atau hasil yang dapat diukur.

Selain itu, tanggapan Spanyol terhadap kekhawatiran ini juga tercantum dalam pedoman tersebut, yang menyatakan bahwa Spanyol akan melakukan pemantauan dan evaluasi selama pelaksanaan programnya di bawah pengawasan kelompok penasihat khusus yang akan menyusun laporan tahunan selama pelaksanaan program tersebut; namun, kurangnya transparansi menunjukkan bahwa Spanyol telah gagal mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sejak konsepsi dan penerbitan pedoman pada Oktober 2023, tidak ada dokumen resmi lain yang menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil, perkembangan kebijakan, dan

evaluasi yang dilakukan oleh kelompok penasihat. Belum lagi, tidak ada bukti jaringan aliansi kelompok penasihat yang disebutkan terkait pengawasan tersebut. Adanya ketidakselarasan antara tujuan-tujuan ambisius Spanyol dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya mengindikasikan suatu pendekatan feminisme yang lebih bersifat performatif. Hal ini menciptakan kesan bahwa feminisme hanya berfungsi sebagai label kosmetik dan strategi *branding*, bukan sebagai agenda transformatif, sehingga memungkinkan Spanyol untuk menampilkan diri sebagai pemimpin normatif tanpa menerapkan perubahan sistemik yang diperlukan untuk mengatasi struktur patriarki yang sudah mengakar.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, identitas nasional Spanyol sangat tertanam dalam konsep-konsep kolonial seperti kejayaan sejarah, maskulinitas militeristik, dan pemeliharaan norma-norma tradisional—yang telah dinormalisasi dalam masyarakat kontemporer. Normalisasi ini, yang diartikulasikan melalui *Machismo*, berfungsi sebagai kerangka kerja sosio-budaya yang membatasi dan secara historis telah menghambat perkembangan pemikiran feminis; bahkan ketika wacana feminis tersedia, *Machismo* memediasi dan melemahkan pemahamannya, sering kali mereduksinya menjadi adopsi feminisme liberal Barat yang dangkal—yang López (2024) sebut sebagai '*Feministas Blancas*'. Krusialnya, individu-individu yang terpapar *Machismo* sering kali menduduki posisi manajerial dan pengambilan keputusan di dalam organisasi kebijakan dan pembangunan Spanyol, sehingga melanggengkan pemahaman yang terbatas ini pada tingkat struktural. Meskipun demikian, mengingat komitmen Spanyol yang telah lama ada terhadap kesetaraan gender, upayanya untuk mencapai tujuan transformatif tidaklah mengejutkan. Namun, realitas empiris yang disebutkan di atas—terutama kegigihan dan reproduksi *Machismo*—menekankan adanya ketidaksesuaian mendasar antara ambisi pemerintah yang progresif dan konteks sosio-budaya yang relatif masih regresif.

Jelaslah bahwa identitas patriarki yang terinternalisasi ini—meskipun merupakan faktor penting yang membentuk individu pengambil keputusan dan sikap masyarakat secara luas—hanyalah salah satu elemen dalam sistem yang lebih luas yang berakar pada nilai-nilai patriarki yang sudah mengakar kuat. Fenomena *Machismo* di Spanyol berfungsi untuk menormalisasi struktur patriarki yang telah mengendap secara historis, sebuah matriks yang saling terhubung yang terus membentuk masyarakat Spanyol kontemporer. Jika dilihat bersamaan dengan pendekatan Spanyol terhadap agenda feminisnya, terbatasnya pengintegrasian perspektif feminis yang substantif mengungkapkan kesenjangan antara komitmen retorik dan transformasi struktural, yang menekankan perlunya perubahan nyata daripada sekadar pelabelan simbolis. Transformasi semacam itu tidak hanya memerlukan artikulasi ulang kerangka kerja feminis, tetapi juga mengkritik narasi Barat yang menguniversalkan yang mendasari kerangka kerja tersebut.

Kritik serupa terhadap pendekatan Barat terdapat dalam pandangan feminisme pasca-kolonial. Kenyataan bahwa Spanyol memiliki kelemahan dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminisnya menyoroti bahwa Spanyol tidak mampu mempertimbangkan sifat interseksional dari feminisme atau diskursus gender secara umum, dan justru fokus pada pemecahan masalah jangka pendek seperti representasi, partisipasi, dan pemberdayaan—meskipun penting untuk tidak meremehkan upaya-upaya ini, namun jika hal ini dilakukan dalam rangka menghilangkan ketidaksetaraan gender dan kekerasan dengan hanya melibatkan perempuan untuk ‘menggerakkan’ masyarakat, tampaknya perempuan lebih dipandang sebagai agen perubahan daripada korban pasif dari patriarki. Meskipun perempuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di masyarakat hanya karena eksistensi mereka, Spanyol tampaknya hanya memandang mereka berdasarkan potensi mereka untuk berkontribusi pada perbaikan sosial. Inklusi bukan berarti kita harus menunggu perempuan menginginkan perubahan; hal tersebut tidak cukup jika sistem itu sendiri masih bersifat patriarki.

Meskipun demikian, hal ini menimbulkan kesan bahwa Spanyol menganggap pendekatan kebijakan luar negeri feminisnya sudah cukup untuk memposisikan diri sebagai pemimpin dalam wacana global mengenai kesetaraan gender. Penekanan Spanyol pada upaya normatif untuk mempromosikan kesetaraan gender, mendukung advokasi hak asasi manusia di bidang SRHR, serta inklusi dan representasi perempuan di dalam lembaga-lembaga internasional di seluruh Uni Eropa, sejalan dengan daftar upaya yang muncul dari pemahaman feminisme yang berpusat pada Eropa. Akibatnya, status quo tetap utuh, sehingga sistem patriarki dapat mengadopsi bahasa feminis tanpa mengubah secara mendasar kondisi-kondisi yang melanggengkan marginalisasi perempuan.

Selain itu, masih berlanjutnya *Machismo* dalam masyarakat Spanyol dan lembaga-lembaga negara semakin memperkuat keterbatasan ini, karena hal tersebut menormalisasi pemahaman yang sempit tentang feminisme dengan menganggapnya sudah cukup untuk pembuatan kebijakan dan kepemimpinan kelembagaan. Hal ini juga mungkin menunjukkan bahwa mereka yang menduduki posisi manajerial dan pengambilan keputusan mungkin memandang penerapan retorika feminisme liberal sebagai bukti kemajuan, sementara tetap tidak mampu—atau tidak bersedia—menghadapi logika kolonial dan patriarki yang lebih mendalam yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan Spanyol. Namun, Spanyol tetap memutuskan untuk menerapkan kebijakan luar negeri feminisnya.

Mengingat Swedia telah meninggalkan agenda kebijakan luar negeri feminisnya—dengan asumsi bahwa label kini lebih penting daripada substansinya—Spanyol yang berambisi menggantikan Swedia, justru masih berputar pada masalah nilai-nilai patriarki yang berimplikasi pada kebijakan luar negerinya. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan kepada Spanyol persiapan dan tujuan dia untuk menggantikan posisi Swedia.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebijakan luar negeri feminis Spanyol yang berbasis visi progresif, namun tindakan yang minim, memungkinkan Spanyol memposisikan diri di depan banyak negara yang telah dan belum mengadopsi kebijakan tersebut; mengingat sejarah upaya kesetaraan Spanyol, hal ini memperkuat kredibilitasnya sebagai negara ‘feminis’. Implikasi dari mundurnya Swedia dari wacana tersebut membuka jalan bagi Spanyol untuk mengambil alih posisinya sebagai ‘pemimpin’ dalam persaingan negara-negara yang progresif dalam hal feminisme di Uni Eropa dan secara global. Namun, hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan kolonial masa lalu masih ada dalam pemerintahan Spanyol, karena keinginan untuk memimpin, mendefinisikan, dan menguniversalkan agenda-agenda feminis berisiko mengganggu hubungan kekuasaan yang asimetris di mana negara-negara Barat mempertahankan otoritas epistemik atas apa yang merupakan feminisme yang sah, mengartikulasikan kembali pola-pola dominasi kolonial melalui retorika progresif dan diplomasi simbolis alih-alih membongkar struktur hierarkis. Dinamika ini mungkin juga dapat menjelaskan praktik kebijakan luar negeri feminis Spanyol yang sebagian besar bersifat normatif. Alih-alih mengupayakan reformasi struktural yang transformatif, Spanyol lebih menekankan pada upaya memperjuangkan gagasan-gagasan feminis di forum-forum regional dan internasional, secara langsung memperluas jangkauan diplomatiknya, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam diplomasi feminis.

Dalam hal ini, advokasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai salah satu bentuk pengusung norma yang meningkatkan legitimasi internasional Spanyol tanpa harus menghasilkan transformasi yang setara di dalam struktur kelembagaan dan sosialnya sendiri. Hal ini menyoroti bagaimana Spanyol mengimplementasikan kebijakan luar negeri feminisnya, terutama mengingat tidak adanya laporan kemajuan implementasi yang komprehensif yang memungkinkan evaluasi mendalam terhadap struktur pengambilan keputusannya serta hasil kebijakan yang dihasilkan.

Pada Juli 2023, Oxfam menerbitkan *Guía de uso de la herramienta de evaluación de la Política Exterior Feminista*, sebuah panduan yang dirancang untuk menilai implementasi kebijakan luar negeri feminis di berbagai dimensi, termasuk: kerja sama pembangunan internasional dan bantuan kemanusiaan, kebijakan ekonomi dan perdagangan, keamanan, pertahanan, dan kebijakan pembangunan perdamaian, keadilan iklim, serta kebijakan migrasi (Oxfam, 2023). Walaupun tidak secara langsung mengevaluasi Spanyol, meski Spanyol mendukung penerbitan buku ini—panduan ini tetap menjadi satu-satunya kerangka analisis kritis untuk menilai sejauh mana kebijakan luar negeri feminis Spanyol mendorong perubahan transformatif.

Jika dinilai berdasarkan pilar-pilar evaluatif ini, kebijakan luar negeri feminis Spanyol tampaknya secara umum sesuai dengan apa yang dikategorikan Oxfam sebagai pendekatan gender klasik. Berakar secara epistemologis pada pemahaman feminis liberal Barat, kerangka kerja ini memprioritaskan pengintegrasian perempuan ke dalam struktur hukum, politik, sosial, dan budaya yang ada melalui logika *gender mainstreaming*. Namun, karena pendekatan ini sebagian besar bersifat integratif daripada transformatif, sering kali pendekatan ini mereproduksi konseptualisasi biner tentang gender sehingga mereproduksi asumsi cis-heteronormatif yang mempertahankan hubungan kekuasaan yang eksklusif dan diskriminatif dengan kedok inklusivitas. Selain itu, pendekatan gender klasik sering kali mengesensialkan perempuan melalui narasi paternalistik tentang kerentanan, kedamaian, dan perlu perlindungan, yang memperkuat stereotip gender yang mendepolitisasi agen perempuan sambil membiarkan struktur patriarki tetap utuh—sesuai dengan cara Spanyol memandang perempuan seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, penekanan Spanyol pada sekadar ‘menambahkan perempuan’ ke dalam kerangka kerja kelembagaan dan diplomatik yang sudah ada tidaklah cukup untuk berkontribusi secara berarti dalam mengganggu hierarki kekuasaan yang sudah mengakar atau mempertanyakan fondasi maskulin dan kolonial yang mendasari hubungan internasional itu sendiri.

6.2 Saran

Tampaknya ada kebutuhan akan reformasi pola pikir para pembuat keputusan dan para pemegang peran manajerial di dalam struktur pemerintahan Spanyol. Spanyol perlu membuka diri terhadap opsi untuk memahami dan merumuskan kebijakan yang benar-benar mendorong *gender mainstreaming* dan meluncurkan kebijakan transformatif yang meninggalkan nilai-nilai dan kebiasaan kolonial, serta mulai menerapkan pengakuan pasca-kolonial dalam kebijakan-kebijakannya. Tanpa memasukkan perspektif gender modern dan interseksionalitas—yang mengakibatkan ketidakjelasan arah dalam pengembangan kebijakan—Spanyol tidak dapat maju dalam praktik kebijakan luar negeri feminis.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah definisi kebijakan luar negeri feminis itu sendiri yang terus berubah karena tekanan domestik maupun regional menjadi salah satu alasan mengapa Spanyol dan negara-negara serupa kesulitan dengan mengimplementasi kebijakan ini. Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan definisi tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh negara-negara yang mengadopsinya, baik untuk mendorong posisinya sebagai pemimpin feminisme atau untuk mewujudkan perubahan nyata terkait kesetaraan gender dan agenda feminis yang lebih luas. Faktanya, keputusan Swedia untuk mundur dari agenda tersebut disebabkan oleh pemerintah baru mereka—meski merupakan pemerintahan sayap kanan—yang berpendapat bahwa ‘label’ cenderung menutupi substansi sebenarnya, secara tidak langsung menyinggung kenyataan bahwa beberapa negara mungkin lebih fokus pada label feminisme daripada menerapkan perubahan yang transformatif. Namun, seperti kasusnya Spanyol, mereka yang mengadopsi kebijakan luar negeri feminis masih menjadi bahan perdebatan mengenai keberhasilan dan janji-janji mereka dalam menerapkannya, sehingga memberikan ruang baru untuk penelitian lebih lanjut.